

terhadap kesalahan dialaminya yang mengakibatkan kesalahan terhadap pengobatan.

B. Saran

1. Menekankan agar penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menuntaskan kasus yang diakibatkan oleh Kesalahan Pengobatan.
2. Menekankan Dokter dan Apoteker, lebih berhati-hati dalam memberikan resep atau obat.
3. Di sarankan kepada peneliti berikutnya Agar lebih mendalami untuk meneliti tentang penyelesaian kasus kesalahan pengobatan yang dilakukan oleh dokter maupun apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

Wiryo Projodikoro, 1992, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung : sumur)

Achmad Ali, 1998, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

Amran Razak, 2008, *Kesehatan Gratis Sebagai Komoditi Politik*, Jurnal Madani, FKM UMI.

Bart, S, 1994, *Psikologi Kesehatan*, PT Gramedia Widiasarana indonesia, Jakarta

Bappenas, 2005, *Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, Deputi bidang SDM dan kebudayaan*, Bappenas, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek Dan Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah, A, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*,PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kanter E.Y & S.R, Sianturi ; *Asas Asas hukum di indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika , Jakarta.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , Jakarta.

Ridwan HR, 2004, *Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, 2005, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bahder, JN, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

J. Guwandi Medical Error dan Hukum Medis (Fakultas Kedokteran UI)

Indar , 2009, Etika dan hukum Kesehatan, Lephass, Makassar.

Budi Sampurna, 26 juni 2010 , Implikasi Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, (Online), (<http://www.ilunifk83.com/t315-hukum-kesehatan>).

Yesmir Anwar/adang(2009) tentang Sistem Peradilan pidana, Widya Padjdjaran.

Lilik Mulyadi (2006) Hukum Acara Pidana, P.T. Alumni Bandung.

Depkes RI, 2004, Sistem Kesehatan nasional, Depkes RI Jakarta

Foster dan Anderson, 1986, Antropologi Kesehatan, UI Press, Jakrta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian hukum, Edisi I, Cet, ke-6 (Kencana Jakarta),.

Robert Priharjo, 1995, Teknik Dasar Pemberian Obat bagi Pasien, Cet.II, EGC, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2007, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran

- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
- Undang-Undang nomor 419 tahun 1949 tentang Ordonansi Obat keras.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi tenaga Kesehatan.

Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik kedokteran

Peraturan Menteri republik indonesia nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan praktik Kedokteran

Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin Praktik dan Izin Kerja tenaga Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat di serahkan tanpa resep

Peraturan Pemerintah, No, 51 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan , No, 1010 / Menkes / Per/ XI / 2008, tentang egistrasi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan , No, 1027 / Menkes / Sk / IX /2004, Tentang

Peraturan Menteri Kesehatan, No, 924 / Menkes / Per / X / 1993, tentang daftar obat wajib Apotek

Surat Edaran Keputusan Menteri Kesehatan No, TU, 08.03 / IV / 1400 / 2011, tentang Registrasi , Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Keputusan Menteri Kesehatan , No, 1332, /Menkes / SK / X / 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan , No, 922 / Menkes / Per / X / 1993, tentang ketentuan dan Pemberian Izin Apotek.

Peraturan Pemerintah No, 25 Tahun 1980, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, No, 26 Tahun 1965, tentang Apotek.

